

**PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA PANCER OLEH DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG**

**THE DEVELOPMENT OF PANCER TOURISM VILLAGE BY THE TOURISM YOUTH
AND SPORTS DEPARTEMENT OF SERANG CITY**

Mutiara Dewi¹

¹Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mutiaradewi72@gmail.com

ABSTRACT

Pancer Tourism Village is one of the Tourism Villages in Serang City which has the characteristics of marine tourism and historical tourism but its management activities are still not optimal which makes it difficult for this tourism village to develop even though it has a lot of potential that can be developed. The purpose of this research is to find out how the development management of Pancer Tourism Village carried out by the Tourism, Youth and Sports Office of Serang City, what obstacles affect the development process and how the solution to overcome these obstacles. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through deepening interviews and descriptive data analysis techniques to explore how management and development management in Pancer Tourism Village. Based on the results of the study that the development management carried out by the Tourism, Youth and Sports Office of Serang City has not run optimally. This can be seen from the Pancer Tourism Village facilities which are still inadequate, the condition of the garbage which has not yet found a solution, the lack of good coordination between Disparpora and the Tourism Village Manager, the unoptimal role of Pokdarwis in managing the tourism village and the lack of standardisation of supervision carried out by Disparpora. So that in the future the government is expected to further optimise existing resources to develop Pancer Tourism Village.

Keywords: *Development management, Pancer Tourism Village.*

ABSTRAK

Kampung Wisata Pancer merupakan salah satu Kampung Wisata yang terdapat di Kota Serang yang memiliki karakteristik wisata bahari dan wisata sejarah namun kegiatan pengelolaannya masih belum optimal yang menyebabkan sulitnya kampung wisata ini untuk berkembang walaupun memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengembangan Kampung Wisata Pancer yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang, hambatan apa saja yang mempengaruhi proses pengembangannya dan bagaimana solusi untuk menanggulangi hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui pendalaman wawancara dan teknik analisis data deskriptif untuk mengeksplorasi bagaimana manajemen pengelolaan dan pengembangan pada kampung wisata pancer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa manajemen pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas Kampung Wisata Pancer yang masih kurang memadai, kondisi sampah yang belum dapat ditemukan solusinya, belum terjalannya koordinasi yang baik antara Disparpora dengan Pengelola Kampung Wisata, belum optimalnya peran Pokdarwis dalam mengelola kampung wisata dan belum adanya standarisasi pengawasan yang dilakukan oleh Disparpora. Sehingga kedepannya pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengembangkan Kampung Wisata Pancer.

Kata kunci: *Manajemen Pengembangan, Kampung Wisata Pancer.*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata berperan penting sebagai salah satu sumber penerimaan devisa dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Kedatangan wisatawan asing dan wisatawan lokal memberikan sumbangsih yang besar bagi pendapatan negara terutama menambah jumlah mata uang asing yang masuk ke kas negara.

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sejak tahun 2016 pemerintah fokus pada pengembangan destinasi pariwisata dengan mengembangkan konsep sepuluh Bali baru. Kesepuluh destinasi tersebut adalah Borobudur, Danau Toba, Bromo Tengger Semeru, Pulau Komodo, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Morotai, dan Tanjung Lesung.

Seperti halnya di Provinsi Banten yang merupakan Salah satu provinsi yang menjadi daerah tujuan wisata (DTW) di pulau Jawa. Salah satu yang paling terkenal adalah Taman Nasional Ujung Kulon, tempat perlindungan bagi badak bercula satu dan juga wisata pantai. Selain kaya akan wisata alam, Banten juga memiliki adat istiadat serta tradisi yang masih sangat kental didalam kehidupan masyarakatnya yang masih turun temurun sampai saat ini. Seperti debus, rudat, pencak silat, tari syaman, ketimpring, baca syekh, panjang mulud, mawalan, buka pintu, marawis, marhaban dan masih banyak lagi (Bantenheadline.com).

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti, Provinsi Banten memiliki beberapa wisata unggulan yang menjadi primadona di Banten. Objek wisata yang paling banyak didatangi di Provinsi Banten ialah wisata pantai, seperti taman nasional ujung kulon, seperti taman nasional ujung kulon, tanjung lesung, anyer, carita, tanjung

layar/sawarna dan masih banyak lagi. Sejauh ini wisata pantai masih menjadi daya tarik utama di Provinsi Banten, padahal selain kaya akan wisata pantai, Banten juga masih memiliki banyak sekali objek wisata buatan, wisata religi, wisata heritage dan lainnya yang belum banyak diketahui orang (dpmpstp.bantenprov.go.id).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten mencapai puluhan juta orang per tahun, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2014 hingga 2018, BPS mencatat wisatawan nusantara yang datang ke Banten mencapai 819.992.617 kunjungan.

Dari data jumlah wisatawan tersebut, dapat dilihat jumlah wisatawan terbanyak ada di Kabupaten Serang dengan jumlah wisnus dan wisman 8.394.298 jiwa dan peringkat kedua ada di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah wisnus dan wisman mencapai 3.105.051 jiwa dan posisi ketiga adalah Kota Serang dengan jumlah Wisman dan Wisnus 2.209.785 jiwa.

Dalam data tersebut, Kota Serang menduduki peringkat ketiga dengan jumlah wisatawan mencapai 2.209.785 jiwa pada tahun 2018. Hal ini merupakan pencapaian yang cukup baik, mengingat Kota Serang mengalami peningkatan jumlah wisatawan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.068.084 jiwa di tahun 2017 (disparpora kota serang).

Dalam arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Serang dan dalam Peraturan Daerah Kota Serang No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030, disebutkan bahwa penataan dan pengembangan kawasan kuliner di Kecamatan Kasemen dan pusat kota sangat perlu dilakukan. Selain itu pengembangan ekowisata juga perlu dilakukan untuk menggali potensi potensi kawasan wisata alam dan melestarikan pelabuhan karangantu yang sudah mulai

jenuh karena belum disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana pendukung.

Salah satu tempat wisata di kawasan Pelabuhan Corantu yang patut dikembangkan adalah Kampung Wisata Pancer di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kampung wisata pancer merupakan kampung wisata yang paling baru diresmikan oleh Disparpora Kota Serang pada tanggal 19 Desember 2018. Kampung wisata pancer didirikan atau diresmikan atas dasar gagasan Disparpora Kota Serang, Masyarakat setempat dan Pokdarwis dengan menggunakan APBD Kota Serang. Rencana pengembangan kampung wisata pancer juga telah dituangkan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang Tahun 2018

Desa Wisata Pancer merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi yang mumpuni untuk dikembangkan baik dari segi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya manusia (SDM) serta potensi lain yang masih belum diketahui oleh banyak orang. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pariwisata Disparpora Kota Serang salah satu tujuan dibentuknya kampung wisata pancer juga dimaksudkan untuk menunjang pengembangan dan perbaikan pelabuhan karangantu sesuai dengan tujuan dari RPJMD Kota Serang yang sudah dituliskan. Dengan dilakukannya pengembangan pada kampung wisata ini diharapkan juga dapat membantu pemerintah Kota Serang dalam mengoptimalkan implementasi peraturan yang sudah dibuat.

Namun kendala yang dihadapi oleh Disparpora Kota Serang dan pihak Pokdarwis merupakan kendala finansial yang belum diturunkan dari Pemerintah Kota Serang untuk pengembangan kampung wisata secara berkelanjutan, selain itu belum adanya kerjasama dengan pihak swasta terkait dengan

masalah pengadaan untuk keperluan kampung wisata pancer maupun kerjasama dalam bentuk lain. Hal itu juga yang menyebabkan kurang maksimalnya proses pengembangan kampung wisata pancer.

Selain masalah keuangan, hasil pengamatan peneliti di desa wisata ini menunjukkan kurangnya fasilitas pendukung pariwisata seperti sarana dan prasarana serta tempat pembuangan sampah sementara, yang mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan di sekitar desa, terutama di tempat wisata utamanya, Taman Mangrove. Sebagai desa pesisir yang padat penduduknya, pengelolaan sampah menjadi salah satu permasalahan Desa Wisata Pancer. Sampah ini berasal dari sampah rumah tangga dan sampah yang dihasilkan dari kegiatan wisata. (JUMPA Volume 8, No 1, Juli 2021.

Kondisi Taman Mangrove yang merupakan daya tarik utama di kampung wisata pancer yang masih dipenuhi oleh sampah yang berserakan dan belum ada penanganan lebih lanjut yang dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab maupun masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Kecamatan Kasemen, minimnya tempat pembuangan sementara juga masih menjadi masalah dalam penanganan sampah. Problematika sampah ini sendiri pun bukan hanya terjadi di kampung wisata pancer saja, namun permasalahan sampah di kecamatan kasemen sendiri pun masih menjadi permasalahan masyarakat umum yang belum ditemukan solusinya. Kondisi ini tentunya harus bisa ditangani oleh pihak pengelola apabila ingin menjadikan kampung wisata pancer diminati oleh banyak pengunjung.

Selanjutnya masih rendahnya pengorganisasian yang terkait dengan departemenisasi atau pembagian tugas di dalam organisasi Disparpora maupun pihak Pengelola wisata yaitu Pokdarwis ki amuk. Hal ini juga dibenarkan oleh

Ketua Pokdarwis Ki Amuk berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa belum ada pembagian tugas secara khusus yang dilakukan oleh Disparpora untuk mengelola kampung wisata secara optimal dan juga belum adanya satuan tugas khusus yang diturunkan oleh disparpora untuk menjadi penanggung jawab kampung wisata pancer selain Pokdarwis.

Permasalahan selanjutnya yang ditemukan peneliti selama di lapangan yaitu belum adanya Upaya atau program yang dilakukan oleh Disparpora Kota Serang terkait dengan pemberdayaan pegawai ataupun masyarakat yang memiliki tujuan untuk memotivasi pengelola agar dapat terus bekerja sama dalam mengelola kampung wisata pancer. Hal ini juga di benarkan oleh ketua pokdarwi ki amuk yang mengatakan bahwa belakangan ini kinerja dari pokdarwis sendiri menurun, dan hilangnya semangat berorganisasi yang terjadi di dalam kepengurusan Pokdarwis Ki amuk. Permasalahan terakhir yang ditemukan peneliti di lapangan ialah belum terjadinya kegiatan monitoring atau pengawasan secara khusus, selama ini Monitoring yang dilakukan oleh Disparpora hanya saat saat ada acara tertentu saja dan belum memiliki jadwal monitoring secara rutin.

Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal dari kegiatan pariwisata di daerah tersebut. Nilai penting dari pengembangan desa wisata dalam kerangka pemberdayaan semua elemen pendukung desa wisata adalah untuk mempromosikan pemberdayaan masyarakat lokal (misalnya pemandu wisata, staf hotel dan restoran, pengrajin, seni pertunjukan, dll.) serta keunikannya. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat juga berarti memungkinkan masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada Masyarakat (*people center development*).

George R. Terry (2010:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah manajemen sedangkan pelaksanaannya disebut manajer. Lebih lanjut, George R. Terry (2010:9) mengatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang secara spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang terkait.

Menurut Cooper et al dalam Sunaryo (2013:159), kerangka kerja pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Daya tarik, yang meliputi keunikan dan daya tarik yang berbasis pada alam, budaya, dan buatan manusia/buatan.
2. Aksesibilitas, yang meliputi kemudahan fasilitas dan sistem transportasi.
3. Amenitas, yang meliputi fasilitas pendukung dan penunjang wisata.
4. Layanan pendukung, yang mendukung kegiatan pariwisata.

5. Institusi yang memiliki wewenang, tanggung jawab dan peran dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, disebut metode postpositivisme karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan metode interpretive karena data dan temuan penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, (Sugiyono 2014:2-3). Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendalaman wawancara kepada informan meliputi Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Pegawai di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, selain itu juga informan dari perangkat desa dan pengelola wisata yaitu Pokdarwis Ki Amuk desa Pancer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George R Terry bahwa proses perencanaan harus mencakup seluruh aspek yang bisa menunjang pengembangan suatu instansi ataupun perusahaan. Dalam manajemen pengembangan pariwisata proses perencanaan harus meliputi seluruh aspek yang dapat menunjang pengembangan pariwisata, seperti yang dikemukakan oleh Cooper dkk yang meliputi Attraction, Accesibility, Amenity, Ancillary services dan Institution.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa pada proses perencanaan yang dilakukan oleh

Disparpora Kota Serang belum dilakukan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari temuan lapangan yang peneliti dapatkan bahwa perencanaan yang dilakukan belum mencakup seluruh aspek aspek yang dapat mendukung jalannya proses pengembangan serta sesuai dengan hasil wawancara pada sub sebelumnya yang dapat peneliti simpulkan bahwa belum maksimalnya perencanaan pengembangan yang dibuat oleh Disparpora dalam upaya mengembangkan Kampung Wisata Pancer. Dalam hal ini proses penjabaran Visi Misi Walikota Serang kedalam rencana strategis Disparpora Kota Serang belum mencakup aspek aspek penting dalam pengembangan pariwisata.

Hal ini dapat peneliti ketahui setelah melakukan penelitian di lapangan dan dapat diketahui bahwa program unggulan untuk pengembangan kampung wisata secara keseluruhan belum berfokus kepada aspek aspek penunjang kampung wisatanya seperti atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan fasilitas umum. Program pengembangan unggulan yang dilakukan untuk kampung wisata rintisan termasuk kampung wisata pancer baru sebatas program peningkatan daya tarik objek wisata yang didalamnya terdapat kegiatan berupa memaksimalkan pemberdayaan sumber daya manusia yang ditujukan untuk pengelola kampung wisata atau POKDARWIS. Karena belum adanya program pengembangan yang merujuk kepada atraksi, aksesibilitas, dan amenitas maka hal itu menyebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata di Kampung Wisata Pancer.

Selain itu peneliti juga menemukan fakta bahwa Disparpora masih terkendala terkait anggaran untuk melakukan pengembangan di Kampung Wisata Pancer. Dalam hal ini anggaran merupakan aspek yang penting bagi kegiatan pengelolaan dan pengembangan pada objek wisata, dengan tersedianya anggaran maka akan berpengaruh terhadap ketersediaan

sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Karena keberhasilan suatu kegiatan pengembangan pariwisata salah satunya ditentukan oleh adanya beragam atraksi, serta kelengkapan sarana pendukung pariwisata. Seperti yang terdapat pada jurnal yang ditulis oleh Hemas Prabawati Jakti Putri dan Asnawi Manaf tahun 2013 bahwa faktor penting dalam keberhasilan pengembangan desa wisata di dataran tinggi dieng ini dilatarbelakangi oleh perencanaan yang matang terkait dengan atraksi wisata yang memanfaatkan potensi alamiah untuk diperbaharui menjadi lebih menarik di mata wisatawan, selain itu juga pokdarwis setempat melakukan perencanaan yang mengutamakan pembangunan fisik kelayakan daya tarik seperti sarana prasarana, dan untuk melengkapi fasilitas seni dan budaya.

Pengorganisasian

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Serang No. 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, yang menyatakan: "Arah kebijakan pembangunan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi; optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata; akselerasi kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan; standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pembagian tugas yang dilakukan oleh Disparpora untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan pada Kampung Wisata Pancer ialah dengan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang dibentuk pada tahun 2016 yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Namun fakta yang peneliti temukan selama melakukan penelitian lapangan bahwa

pengembangan sumber daya pariwisata pada pengelola kampung wisata pancer maupun seluruh pokdarwis yang ada di kota serang belum memperhatikan standard pendidikan untuk anggota kepengurusannya.

Hal ini dapat dilihat dari kepengurusan POKDARWIS Kiamuk yang merupakan tombak utama dalam proses pengelolaan dan pengembangan Kampung Wisata Pancer belum sesuai dengan passion yang digelutinya. Selain itu anggota kepengurusan Pokdarwis belum memiliki standarisasi pendidikan bagi seluruh anggota yang tergabung, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Pokdarwis Kiamuk yang dinilai masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Disparpora Kota Serang. Salah satunya dikarenakan oleh lemahnya koordinasi yang dilakukan antara Disparpora dan juga Pokdarwis Kiamuk terkait dengan laporan kegiatan pariwisata serta masih banyaknya anggota Pokdarwis Kiamuk yang memiliki kesibukan masing-masing diluar kegiatan pengelolaan Kampung Wisata Pancer, masing masing anggota pokdarwis tersebut memiliki pekerjaan tetap diluar kegiatan pengelolaan yang menyebabkan kurang optimalnya kegiatan pengelolaan yang dilakukan.

Selain koordinasi yang dilakukan oleh Disparpora dengan pihak Pokdarwis yang masih belum optimal. Koordinasi lintas sektor sebagaimana yang tertulis didalam RIPARDA Kota Serang juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan membuktikan bahwa belum adanya koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh Disparpora dengan SKPD lain. Menurut hasil wawancara bahwa peraturan yang berkaitan dengan Koordinasi antar sektor tersebut baru sedang dirumuskan oleh pemerintah Kota Serang. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan instansi yang

terdapat di Kampung Wisata Pancer yang menyatakan bahwa belum ada koordinasi secara langsung yang dilakukan oleh Disparpora terkait dengan kerjasama dalam hal pengembangan Kampung Wisata Pancer.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti pada penelitian yang ditulis oleh Hemas Prabawati Jakti Putri dan Asnawi Manaf tahun 2013 yang berjudul Faktor-Faktor keberhasilan Pengembangan Desa Wisata Di Dataran Tinggi Dieng mengatakan bahwa keberhasilan suatu kegiatan pengorganisasian dalam pengembangan pariwisata harus dilatarbelakangi oleh kuatnya organisasi pengelola atau pokdarwis sebagai tombak utama dalam hal pengelolaan objek wisata. Selain itu terjalannya koordinasi yang baik antar SKPD lintas sektor juga merupakan hal penentu bagi keberhasilan kegiatan pengorganisasian, karena dengan terjalannya koordinasi yang baik akan menimbulkan kesamaan visi dan misi antar SKPD untuk mencapai tujuan yang sama.

Pengarahan

Motivasi merupakan hal yang melatar belakangi individu berbuat untuk mencapai tujuan tertentu. Robbins (2007:482) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang ikut menentukan intensitas, arah dan ketekunan individu dalam upaya mencapai sasaran. Motivasi sangat diperlukan oleh seseorang baik individu maupun dalam sebuah organisasi. Seperti halnya organisasi kepariwisataan yang memiliki anggota, para anggota tersebut harus diberikan motivasi agar dapat bekerja secara lebih maksimal. Dalam kegiatan kepariwisataan, OPD terkait dan juga pengelola pariwisata harus dapat mengoptimalkan pengembangan potensi yang dimiliki di daerah tersebut untuk menarik minat wisatawan. Menurut Barreto dan Giantari (2015:34) pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk megembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek

wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan bahwa pemberian motivasi yg dilakukan oleh Disparpora ialah dengan memberikan pelatihan kepada kelompok pengelola Kampung Wisata Pancer yaitu Pokdarwis Kiamuk dan anggotanya. Namun pemberian motivasi yang dilakukan belum merata kepada seluruh masyarakat yang ada di Kampung Wisata Pancer. Belum terlaksananya pemberian motivasi kepada masyarakat juga disebabkan oleh belum terjalannya koordinasi atau kerjasama antara Disparpora dengan dinas dinas lain seperti Disperindag yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan di bidang UMKM. Selain permasalahan tersebut, Disparpora bersama dengan Pokdarwis Kiamuk juga belum menindaklanjuti potensi potensi yang ada di Kampung Wisata Pancer. Kurangnya pengarahan dan bimbingan yang dilakukan oleh OPD yang terlibat dan pengelola juga menjadi salah satu alasan mengapa potensi tersebut belum dapat dikembangkan sampai saat ini. Berdasarkan temuan lapangan yang peneliti dapatkan kurangnya pengarahan yang dilakukan oleh Disparpora ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya Covid 19 yang mengakibatkan ditutupnya sebagian besar objek wisata. Oleh karena itu kegiatan pariwisata yang semula berjalan secara normal kini terganggu.

Mardikanto dkk (2013:82) meyakini bahwa dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat (pemerintah) sendiri, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa partisipasi masyarakat setempat Kampung Wisata Pancer masih terbilang cukup rendah. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan dan pengembangan Kampung Wisata Pancer. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi kampung wisata pancer yang masih jauh dengan prinsip sapta pesona pariwisata yang mencakup keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan. kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan kampung wisata merupakan hal yang cukup urgent, karena pada prinsip pengelolaan kampung wisata salah satu aspek terpenting dalam kegiatan pengelolannya adalah melibatkan masyarakat secara luas atau *People Center Development*.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kampung wisata akan berdampak baik bagi berbagai aspek seperti aspek ekonomi. Seperti halnya yang peneliti temukan dalam jurnal yang berjudul "Faktor-Faktor Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata Di Dataran Tinggi Dieng" oleh Hemas Prabawati Jakti Putrid an Asnawi Manaf tahun 2013 pada penelitiannya mengatakan bahwa Desa Dieng Kulon berhasil memberdayakan masyarakat mereka untuk bergerak di bidang pariwisata. Pelaku utama dalam kegiatan pariwisata terutama wisata budaya dan adat istiadat ini adalah masyarakat setempat dan didanai oleh PNPM mandiri untuk masyarakat pelaku wisata atau embrio aktivitas masyarakat yang menjadi daya tarik wisata, sehingga masyarakat pelaku wisata di Desa ini dapat bergerak secara mandiri.

Dalam hal ini juga peneliti menemukan hambatan hambatan yang ditemukan selama melakukan penelitian di lapangan permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan pengembangan kampung wisata pancer yaitu karena kurangnya partisipasi dari masyarakat sekitar yang belum termotivasi dan belum memiliki inisiatif untuk melakukan pengelolaan terhadap kampung wisata pancer secara bersamaan. Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola juga yaitu terkait kepemilikan tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat setempat yang belum ditemukan jalan keluarnya. Hambatan selanjutnya itu lokasi kampung Wisata Pancer ini bertepatan dengan wilayah kerja TNI Angkatan Laut, jadi dari Disparpora sendiri perlu melakukan koordinasi tambahandengan pihak Angkatan Laut untuk menentukan perencanaan pengembangan terhadap kampung Wisata pancer. Dan permasalahan selanjutnya ialah terhambatnya proses pengelolaan kampung wisata pancer ini yang disebabkan oleh adanya virus Covid 19 yang mengharuskan dinonaktifkannya kegiatan pariwisata.

Berdasarkan uraian di atas pada aspek pengarah atau pelaksanaan dalam proses pengembangan kampung wisata pancer dinilai belum optimal karena mempertimbangkan beberapa hal seperti belum meratanya pemberian motivasi yang dilakukan oleh Disparpora terhadap masyarakat sekitar kampung wisata pancer.

Selanjutnya belum di tindak-lanjutnya pengembangan potensi yang ada di kampung wisata pancer yang dapat dilihat dari belum adanya atraksi tambahan di kampung wisata pancer, rendahnya partisipasi masyarakat sekitar terhadap pengelolaan kampung wisata pancer dan hambatan hambatan yang masih belum dapat ditemukan solusinya.

Pengawasan

Pengawasan adalah proses rutin untuk mengumpulkan data dan mengukur kemajuan obyektif suatu program. Pemantauan berfokus pada proses dan keluaran. Pemantauan memiliki beberapa tujuan, yaitu: untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana; untuk mengidentifikasi masalah yang muncul agar dapat segera diatasi; untuk menilai apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan; untuk mengidentifikasi kaitan antara kegiatan dan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan; untuk menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti dapat mengetahui bahwa standar pengawasan untuk mengawasi Kampung Wisata Pancer belum dibuat atau ditentukan secara pasti. Pengawasan langsung maupun tidak langsung belum begitu dilakukan mulai dari pihak Pemerintah Desa maupun Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang. Selanjutnya peneliti menemukan bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Disparpora belum dilakukan secara optimal karena kegiatan monitoring belum terjadwalkan dengan rutin, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa kegiatan monitoring hanya dilakukan saat akan diadakan even even tertentu saja, dan kegiatan monitoring pun belum terkoordinasi dengan perangkat desa yang terkait maupun instansi pemerintahan yang berlokasi di pancer untuk membantu jalannya proses monitoring di Kampung Wisata Pancer.

Belum adanya standarisasi pengawasan atau monitoring ini menyebabkan tidak optimalnya kegiatan monitoring yang dilakukan di lapangan. Hal itu dikarenakan belum dibentuknya target target pencapaian yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu serta tidak adanya kegiatan evaluasi yang

dilakukan oleh Disparpora dengan Pokdarwis sebagai pihak pengelola untuk mengetahui apa saja hal hal yang harus lebih diperbaiki.

Setelah proses pengawasan yang telah dilakukan pada suatu kegiatan, akan terlihat suatu perubahan yang ditimbulkan baik kemajuan maupun kemunduran. Dalam proses pengembangan Kampung Wisata Pancer pasti akan terdapat beberapa penyimpangan dan hambatan didalamnya. Penyimpangan dan hambatan tersebut dapat diidentifikasi setelah dilakukannya kegiatan monitoring. Proses monitoring atau pengawasan itu sendiri dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki suatu kesalahan kesalahan yang terjadi dapat menyebabkan penyimpangan yang cukup fatal. Apabila terjadi penyimpangan, maka langkah yang harus diambil adalah dengan melakukan upaya tindakan koreksi sebagai cara mengatasi penyimpangan.

Berdasarkan temuan lapangan yang peneliti dapatkan, peneliti dapat mengetahui bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang dalam mengatasi dan menanggulangi hambatan hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Disparpora dalam menanggulangi hambatan yang ada pada proses pengembangan Kampung Wisata Pancer salah satunya adalah dengan mengajukan anggaran tambahan ke Pemerintah Kota Serang untuk kegiatan pengelolaan objek wisata. Selain itu juga pemerintah telah memfasilitasi Pokdarwis Kiamuk untuk melakukan pelatihan, studi banding bahkan mengikut sertakan Pokdarwis kedalam perlombaan pokdarwis se-Banten dan se-indonesia. Namun pemerintah belum mengambil tindakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar agar mau bekerja sama untuk mengelola kampung wisata pancer dan pemerintah juga belum merumuskan rencana strategis untuk

mengembangkan atraksi wisata yang terdapat di kampung wisata pancer.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada aspek pengawasan dalam proses pengembangan Kampung Wisata Pancer oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari belum dibentuknya standard pengawasan yang jelas oleh Disparpora Kota Serang, hal selanjutnya dapat dilihat dari belum adanya jadwal monitoring rutin yang dilakukan oleh Disparpora maupun dari pihak kelurahan setempat, hal selanjutnya ialah masih kurang optimalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani atau menanggulangi hambatan yang muncul dalam proses pengembangan Kampung Wisata Pancer. Sedangkan dalam fungsi manajemen, tahapan pengendalian atau pengawasan harus di maksimalkan dengan baik karena pada proses ini dapat menentukan apakah Kampung Wisata Pancer ini berubah ke arah yang lebih baik atau sebaliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori manajemen menurut George R Terry yang meliputi: Perencanaan (*Planning*); Pengorganisasian (*Organizing*); Pengarahan (*Actuating*); dan Pengawasan (*Controlling*) dan menggunakan indikator-indikator tambahan dari teori pengembangan menurut Cooper dkk yang meliputi Obyek daya tarik wisata (*Attraction*), Aksesibilitas (*Accesibility*), Amenitas (*Amenities*), Fasilitas Umum (*Ancillary Services*), Kelembagaan (*Institutions*) peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen Pengembangan Kampung Wisata Pancer oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya permasalahan-permasalahan yang

terjadi selama proses manajemen pengembangan Kampung Wisata Pancer yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Adapun juga dalam prosesnya, pengembangan kampung wisata pancer belum dapat memenuhi konsep Sapta Pesona Pariwisata yang meliputi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan dengan belum memaksimalkan pengembangan segala sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Hal tersebut tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di suatu daerah secara lebih maksimal.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan agar dapat membantu dalam upaya Pengembangan Kampung Wisata Pancer diantaranya:

1. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang perlu lebih mengoptimalkan proses perencanaan yang bisa dimulai dari memperhatikan aspek A4 11 (*Attraction, Accesibility, Amenity, Ancillary Services & Institutions*), dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja secara lebih mendetail agar dapat memaksimalkan proses pengembangan pariwisata di Kota Serang.
2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang perlu membuat program unggulan terkait dengan pengembangan pada kampung wisata pancer yang bersifat continue, seperti program pembinaan usaha pariwisata terhadap masyarakat Kampung Wisata Pancer serta program-program lain yang dapat

menunjang proses pengembangan Kampung Wisata.

3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang juga Perlu menjalin koordinasi dengan SKPD lintas sektor lain serta dengan perangkat desa yang terlibat agar dapat terbentuknya kesatuan visi misi antara Dinas, perangkat desa dan pengelola kampung wisata.
4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang perlu membuat standard pengawasan untuk monitoring ke tiap tiap destinasi wisata, tujuannya adalah dengan adanya standarisasi pengawasan maka pemerintah bersama dengan pengelola akan dapat mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang dapat menghambat dan dapat mencari solusi untuk permasalahan tersebut secepat mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiana, R., Kartika, T., & Tawakal, M. I. (2022). Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Wisata di Kampung Wisata Cibiru. *Bemas J. Bermasyarakat*, 3(1), 50-58.
- Hardi Alunaza Dan Bastian Andhony Toy, (2020) "*Analisis Pariwisata Ha Long Bay Terhadap Perekonomian Vietnam*". Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 2020 Vol. 01 (1), 38-49
- Idris, M. T., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2019). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan dan Kampung Tridi (Studi Kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Respon Publik*, 13(4), 68-77.
- Irwan Tamrin, Rusdin Tahir, M. Liga Surdayana, Arfah Sahabudin, (2021) oleh "*Dari Sejarah Menuju Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Kampung Wisata Pancer*". JUMPA Volume 8, Nomor 1, Juli 2021.
- Khusnul Khotimah Wilopo & Lukman Hakim, (2017) "*Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus Pada Kawasan Situs Trowulan Sebagai Pariwisata Budaya Unggulan Di Kabupaten Mojokerto)*" Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol 41 No.1 Januari 2017.
- Maharani, S. A., Mulki, G. Z., & Yuniarti, E. (2020). Strategi Pengembangan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa Kecamatan Pontianak Utara. *JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*, 7(2).
- Muhammad Harim Dan Saharuddin, Oleh "*Analisis Potensi Objek Wisata Alam Di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo*". Jurnal Akuntansi, Vol. 03 No. 1 Februari 2017.
- Nandang Hendriawan Dan Erni Mulyanie. (2018) "*Analisis Potensi Pariwisata Air Terjun Kabupaten Tasikmalaya*", Jurnal Geografi Vol. 15 No. 1
- Nisa, K., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2019). Pengembangan kampung wisata jodipan dan kampung wisata tridi oleh pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan status sosial dan ekonomi masyarakat (studi kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Respon Publik*, 13(1), 29-33.
- Saputra, D. (2020). Tata Kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat GOVERNMENT: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 85-97.
- Sri Rahayu Budiani, Windarti Wahdaningrum, Dellamanda

Yoski, Eline Kensari, Hendra S Pratama, Henny Mulandari, Heru Taufiq Nur Iskandar, Mika Alphabettika, Novella Maharani, Rizka Fitri, Febriani, Yanti Kusmiati, (2018) *“Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan*

Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas Di Desa Sembungan, Wonosobo Jawa Tengah”, Majalah Geografi Indonesia Vol.32, No.2, September 2018 (170-176).